

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI  
KHUSUS, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Muhammad Abdul Malik Ridho

Nomor Mahasiswa : 18313067

Prodi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
YOGYAKARTA  
2021**

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI  
KHUSUS, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ekonomi Pembangunan,  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Muhammad Abdul Malik Ridho  
Nomor Mahasiswa : 18313067  
Prodi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
YOGYAKARTA  
2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembanguna FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 November 2021

Penulis,



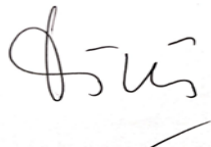
Muhammad Abdul Malik Ridho

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Nama : Muhammad Abdul Malik Ridho  
Nomor Mahasiswa : 18313067  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 11 November 2021  
telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,



Diana Wijayanti, S.E., M.Si.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI  
HASIL PAJAK, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN  
PENDAPATAN DI INDONESIA**

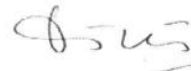
Disusun Oleh : **MUHAMMAD ABDUL MALIK RIDHO**

Nomor Mahasiswa : **18313067**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 10 Desember 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti,,S.E., M.Si.

  
.....

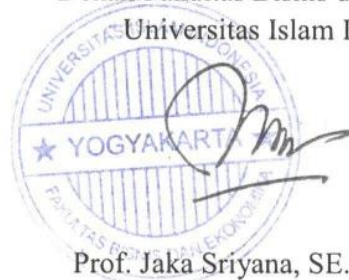
Penguji : Sahabudin Sidiq,Dr.,S.E., M.A.

  
.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

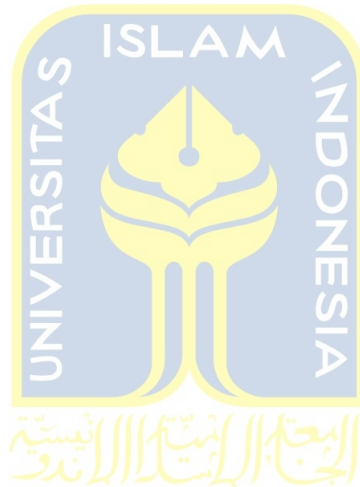
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji Syukur atas rahmat dan nikmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”. Skripsi ini dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia.



## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Puji Syukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”. Penelitian ini selain bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak manapun demi kesempurnaan skripsi ini.

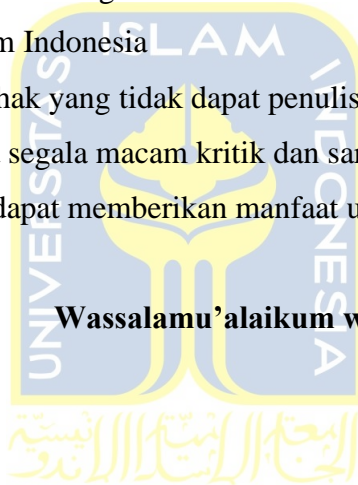
Tidak lupa selama proses penyusunan skripsi penulis mendapat banyak bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Sang Revolusioner sejati Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju ke zaman yang terang.
3. Kedua orang tua yang penulis hormati dan banggakan, Muamir dan Nur hayati yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

6. Ibu Diana Wijayanti, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staff akademik program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Bapak Dr. Julianto P Winarno, MM, M.Si. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat – sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Islam Indonesia
10. Dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menerima segala macam kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak. Amin

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**



Yogyakarta, 7 November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Abdul Malik Ridho'.

(Muhammad Abdul Malik Ridho)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	6
2.1. Kajian Pustaka .....	6
2.2. Landasan Teori .....	9
2.2.1. Ketimpangan Pendapatan .....	9
2.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) .....	12
2.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	14
2.2.4. Dana Bagi Hasil Pajak .....	18
2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi .....	19
2.3. Kerangka Pemikiran .....	21
2.4. Hipotesis Penelitian .....	23

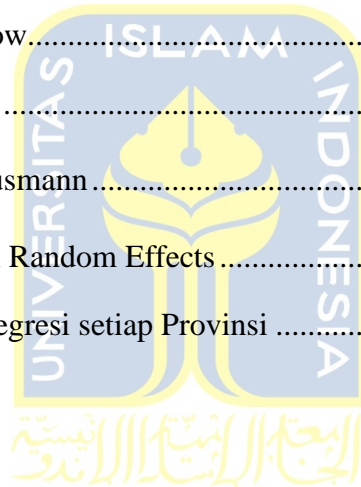
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	24
3.2. Definisi Variabel Operasional .....	25
3.3. Metode Analisis.....	26
3.3.1. Metode Common Effect.....	26
3.3.2. Metode <i>Fixed Effect</i> .....	27
3.3.3. Metode Random Effect .....	27
3.3.4. Uji <i>Chow</i> .....	28
3.3.5. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> .....	28
3.3.6. Uji Hausmann .....	29
3.4. Uji Signifikansi.....	29
3.4.1. Uji Simultan F.....	29
3.4.2. Uji Parsial T.....	29
3.4.3. Koefisien Determinasi ( <i>R-Squared</i> ).....	30
3.5. Persamaan Model Penelitian .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1. Deskripsi Data Penelitian .....	32
4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	33
4.2.1. Estimasi <i>Common Effect</i> , <i>Fixed Effect</i> dan <i>Random Effect</i> model .	34
4.2.2. Pemilihan Model Terbaik.....	37
4.2.3. Uji Kelayakan Model Signifikansi F .....	39
4.2.4. Koefisien Determinasi ( <i>R-Squared</i> ).....	39
4.2.5. Uji Parsial (t-test) .....	39
4.2.6. Persamaan Regresi .....	40
4.2.6.1. Pengaruh DAU terhadap ketimpangan pendapatan .....	44
4.2.6.2. Pengaruh DAK terhadap ketimpangan pendapatan .....	44
4.2.6.3. Pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap ketimpangan pendapatan	46

4.2.6.4. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan.....	47
<b>BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....</b>	<b>49</b>
5.1. Simpulan.....	49
5.2. Implikasi.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gini Ratio Provinsi Indonesia Semester 1 (Maret) 2020 – 2018 .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
Tabel 4.1 Data DAU, DBH Pajak dan DAK tahun 2020 (dalam ribuan rupiah)...	32
Tabel 4.2 Hasil estimasi model Common Effect .....	34
Tabel 4.3 Hasil estimasi model Fixed Effect .....	35
Tabel 4.4 Hasil estimasi model Random Effect.....	36
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	37
Tabel 4.6 Hasil Uji LM.....	37
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausmann.....	38
Tabel 4.8 Cross-section Random Effects.....	40
Tabel 4.9 Persamaan Regresi setiap Provinsi .....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Kuznet .....	10
Gambar 2.2 Kurva Lorenz .....	12
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran .....	23



## ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang umum terjadi di negara berkembang. Berbagai metode telah digunakan oleh berbagai pemerintah di dunia dalam mengatasi ketimpangan. Salah satu metode tersebut adalah dengan peningkatan pelayanan publik di daerah yang salah satunya dengan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH). Jika ketimpangan pendapatan tidak segera di atasi dan dibiarkan dapat menimbulkan akibat yang lebih serius yaitu terkendalanya pengentasan kemiskinan dan peningkatan risiko konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan adalah data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata kunci: Dana Perimbangan, Ketimpangan Pendapatan, Data Panel.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Secara umum, setiap negara di dunia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan semua orang melalui pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah upaya suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Peningkatan kemakmuran dapat diukur antara lain dengan peningkatan pendapatan nasional setiap tahun atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Sukirno, 1985). Selain itu, menurut Todaro & Smith (2006), pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan pendapatan. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan seringkali dinilai dari tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Derajat kemiskinan dan ketimpangan merupakan indikator tingkat kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah lebih terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Tapi itu bukan ketidaksetaraan. Koefisien Gini merupakan salah satu model untuk mengukur derajat disparitas pendapatan antar penduduk. Semakin tinggi koefisien Gini di suatu wilayah, semakin besar ketimpangan di wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa pendapatan tidak merata antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.

Tabel 1.1 Gini Ratio Seluruh Provinsi Indonesia Semester 1 (Maret) 2020 – 2018

Provinsi	Tahun			Provinsi	Tahun		
	2020	2019	2018		2020	2019	2018
Aceh	0.323	0.32	0.325	Nusa Tenggara Barat	0.376	0.38	0.372
Sumatera Utara	0.316	0.32	0.318	Nusa Tenggara Timur	0.354	0.36	0.351
Sumatera Barat	0.305	0.31	0.321	Kalimantan Barat	0.317	0.33	0.339
Riau	0.329	0.33	0.327	Kalimantan Tengah	0.329	0.34	0.342
Jambi	0.32	0.32	0.334	Kalimantan Selatan	0.332	0.33	0.344
Sumatera Selatan	0.339	0.33	0.358	Kalimantan Timur	0.328	0.33	0.342
Bengkulu	0.334	0.34	0.362	Kalimantan Utara	0.292	0.3	0.303
Lampung	0.327	0.33	0.346	Sulawesi Utara	0.37	0.37	0.394
Kep. Bangka Belitung	0.262	0.27	0.281	Sulawesi Tengah	0.326	0.33	0.346
Kep. Riau	0.339	0.34	0.33	Sulawesi Selatan	0.389	0.39	0.397
Dki Jakarta	0.399	0.39	0.394	Sulawesi Tenggara	0.389	0.4	0.409
Jawa Barat	0.403	0.4	0.407	Gorontalo	0.408	0.41	0.403
Jawa Tengah	0.362	0.36	0.378	Sulawesi Barat	0.364	0.37	0.37
Di Yogyakarta	0.434	0.42	0.441	Maluku	0.318	0.32	0.343
Jawa Timur	0.366	0.37	0.379	Maluku Utara	0.308	0.31	0.328
Banten	0.363	0.37	0.385	Papua Barat	0.382	0.39	0.394
Bali	0.369	0.37	0.377	Papua	0.392	0.39	0.384

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia dengan proporsi sebanyak 56,10% dari penduduk Indonesia. Dari data tabel 1.1 di atas diketahui bahwa tingkat ketimpangan di pulau Jawa masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Provinsi DIY tercatat dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,434 (2020), sebesar 0,42 (2019), dan sebesar 0,441 (2018). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu dinikmati oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Beberapa penelitian hingga saat ini, termasuk penelitian Chamber (2010), Wahiba & El Weriemmi (2014), dan Rubin & Segal (2015), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka ketimpangan pendapatan semakin besar. Ketidaksetaraan yang tidak terselesaikan memengaruhi



berbagai masalah multidimensi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Sejak reformasi, tuntutan demokrasi dan penentuan nasib sendiri antar daerah semakin kuat. Pemerintah pada masa Presiden Habibie mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tak lama kemudian, pada 1 Januari 2001, era desentralisasi dimulai. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk menciptakan aspek kemandirian daerah. Pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan di segala bidang pada daerah kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, keuangan dan keuangan, serta agama. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan kepada daerah dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan yang bersifat horizontal maupun vertikal antara pusat dengan daerah (Haryanto, 2015).

Kebijakan desentralisasi fiskal dengan diberikannya dana perimbangan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan di Indonesia. Desentralisasi adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan mengurangi kesenjangan regional (Akai & Sakata, 2005). Dana perimbangan didanai dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Beberapa alat dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan anggaran dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian kinerja pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK)

adalah dana perimbangan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemerintah daerah. Ada tiga standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kebutuhan khusus. Ketiga standar tersebut adalah: 1) Kebutuhan yang tidak dapat ditentukan melalui formula dana alokasi umum; 2) Kebutuhan yang termasuk ke dalam prioritas nasional; 3) Kebutuhan dana untuk upaya pelestarian lingkungan alam dan yang dilaksanakan daerah penghasil. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak penghasilan pasal 25, 29, dan pasal 21, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan lainnya.

Desentralisasi memungkinkan untuk merancang kebijakan ekonomi global dengan kebutuhan ekonomi regional, dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Schnellenbach, Baskaran, & Feld, 2014). Namun pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi tidak selaras dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dana perimbangan yang berimplikasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum mampu mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Atas berbagai permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh bagi hasil pajak terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis tentang pengaruh Dana Perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
2. Dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut
3. Membantu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia untuk penyelesaian masalah ketimpangan di Indonesia
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Variabel Dependen	Hasil
Adhitya Wardhana, Bambang Juanda, Hermanto Siregar dan Kodrat Wibowo (2013)	Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Estimasi panel data	DAU, DAK infratraktur jalan, Jumlah Penduduk, Daerah Kaya, Infrastruktur Jalan, Aturan Hold Harmless sebelum Tahun 2009	- DAU, DAK infratraktur jalan, dan infratraktur jalan berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. - Daerah kaya, populasi, dan dhh berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Ni Putu Valentiana Shanty Putri dan I Ketut Suardhika Natha (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Regresi linier berganda	PAD DAU Belanja Modal	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan - DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan - Belanja Modal berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
Wanti Oktaviani, Zulgani dan Rosmeli (2017)	Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi 2001 – 2016	Indeks Williamson dan Path Analysis	DAU DAK DBH	- DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan - DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan

				- DBH berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan
Muhammad Arham, Yasin Ismail, Sri Indriyani S Dai (2019)	Analysis Of Village Dau, Dak, And Funds On Inequality Distribution Income And Growth In Indonesia 2015-2018	Analisis TSLS	DAU DAK Dana Desa Pertumbuhan Ekonomi	- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; - DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; - Gini ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; - Dana Desa memiliki arah negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan;
Afief El Ashfahany, Rifi Fazrina Djuuna & Nur Fahmi Rofiq (2020)	Does Fiscal Decentralization Increases Regional Income Inequality In Indonesia?	Regresi data panel	Dana Perimbangan, Pendidikan, Ukuran pemerintah	- Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan - Pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan - Ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan
Deni Herdiyana (2019)	Hubungan Realisasi Transfer DAU dan DAK terhadap Kesenjangan Horizontal di Indonesia Study terhadap 33 Provinsi Periode Tahun 2009-2013	Analisis Korelasi	DAU DAK	- Hubungan DAU dan DAK terhadap kesenjangan horizontal adalah kuat. - Korelasi transfer DAU terhadap kesenjangan horizontal adalah lebih signifikan dibandingkan dengan korelasi transfer DAK terhadap

				kesenjangan horizontal tersebut.
Muhamad Sidik, Syurya Hidayat, Muhammad Ridwansyah (2020)	Dampak alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019	Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Deskriptif Kuantitatif	DAU DAK DBH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi,</li> <li>- DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi,</li> <li>- DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi,</li> </ul>

Penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama terletak pada variabel dependen yang digunakan. Banyak penelitian sebelumnya menggunakan indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan koefisien gini sebagai variabel terikatnya. Yang kedua, terletak pada pemilihan variabel independent yang digunakan. Cukup sedikit penelitian yang melihat pengaruh komponen dana perimbangan seluruhnya (DAU, DAK dan DBH Pajak) dengan variabel pertumbuhan ekonomi yang dimasukkan dalam model untuk mengukur pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya variabel independent yang digunakan hanya terbatas pada salah satu komponen dana perimbangan saja dengan beberapa variabel lain diluar dana perimbangan.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian dari Robert E Baldwin (1986) menerangkan bahwa ketimpangan berarti adanya gap pemisah yang cukup besar antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Menurut Robert E Baldwin (1986), kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat di suatu negara. Ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi berarti bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat menjadi semakin tidak merata. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperlebar jurang antara mereka yang memiliki status ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dan kelompok berpenghasilan rendah (kelompok miskin) (Amri, 2017).

Lincoln Arsyad (2010) menerangkan bahwa masalah ketimpangan merupakan hal yang sangat kompleks, karena sering kali bersentuhan dengan berbagai nilai sosial pada suatu kelompok masyarakat. Beberapa kendala dalam pengentasan ketimpangan adalah 1) Pendanaan yang diperlukan sangatlah besar, terbatasnya anggaran di sebagian NSB (Negara Sedang Berkembang) dapat mengganggu upaya pemerataan; 2) Anggaran tidak tepat sasaran. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya hubungan antara pedesaan dengan sektor informal yaitu perwakilan dari golongan miskin dengan institusi formal seperti pemerintah; 3) Hambatan politik. Masyarakat yang berasal dari kelompok bawah acap kali mempunyai kekuatan politik yang lemah (Arsyad, 2010).

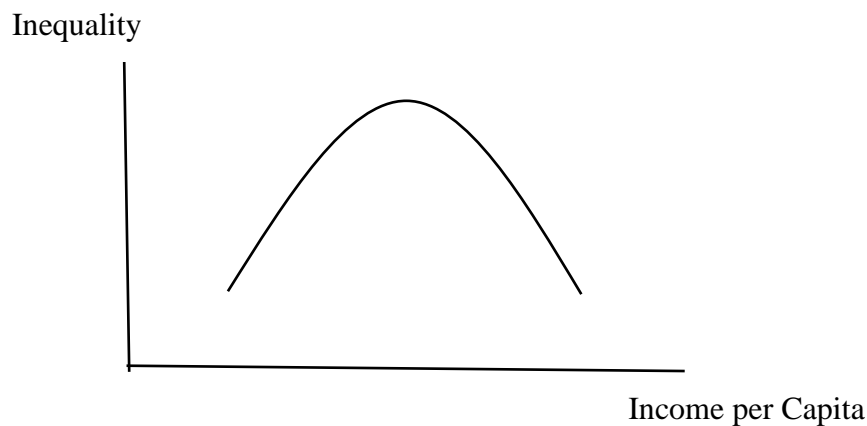
Di sisi lain, pendapat yang diterangkan oleh Adelman dan Morris (1973) berhasil menemukan akar penyebab ketimpangan pendapatan, yaitu:

1. Kenaikan jumlah penduduk membuat pendapatan per kapita menurun.
2. Terdapatnya perbedaan yang signifikan laju pembangunan antar daerah sehingga membuat tingkat kemajuan antar daerah berbeda.

3. Terjadinya Inflasi, ketika pendapatan masyarakat meningkat namun tidak dibarengi dengan kenaikan produksi barang dan jasa.
4. Adanya kebijakan substitusi impor yang membawa dampak pada peningkatan harga-harga hasil industri.
5. Investasi yang hanya fokus kepada industri padat modal yang berakibat pada kenaikan jumlah pengangguran.
6. Tingkat pergerakan atau mobilitas penduduk yang minim.
7. Terpuruknya nilai tukar negara berkembang terhadap nilai tukar milik negara maju.
8. Industri padat karya yang semakin memburuk.

Simon Kuznet mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan *longitudinal (time-series)* dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern. (Kuznet, 1955).

Gambar 2.1 Kurva Kuznet



Sumber: Todaro (2006)



Terdapat beberapa cara pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di antaranya adalah *Gini Ratio*.

### 1. *Gini Ratio*

Koefisien gini atau *Gini Ratio* sebagai indikator untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan. Rumus koefisien Gini sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=100}^n f_{pi}(Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR = Gini Ratio

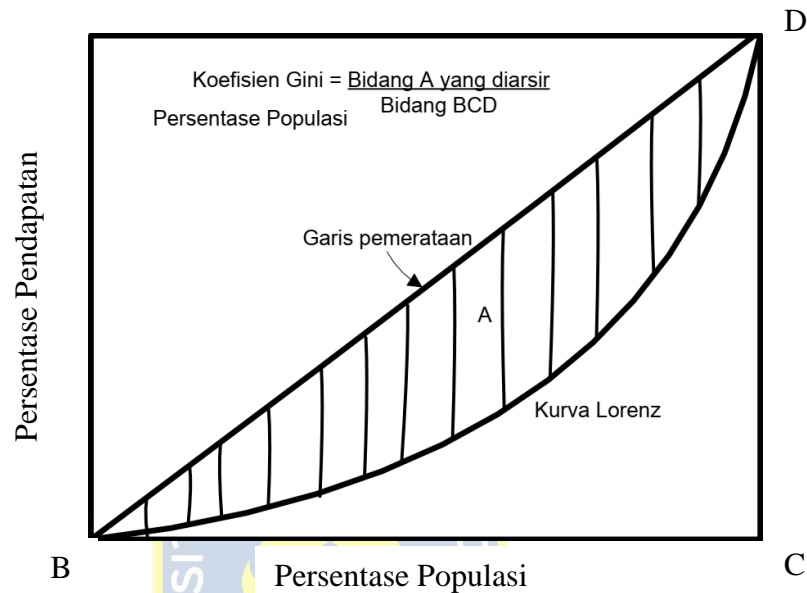
$f_{pi}$  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$Fc_i$  = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$Fc_{i-1}$  = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Ketika rasio gini menurun maka artinya distribusi pengeluaran penduduk membaik dan sebaliknya. Perhitungan rasio gini berasal dari pengukuran luas dari sebuah kurva yang merepresentasikan distribusi pendapatan kelompok masyarakat. Kurva itu dinamakan dengan sebutan kurva Lorenz.

Gambar 2.2 Kurva Lorenz



Sumber: Todaro & Smith (2006)

Dari gambar 2.2 di atas terlihat sebuah daerah yang diarsir. Daerah tersebut merupakan besarnya ketimpangan pendapatan. Rasio gini merupakan perbandingan luas daerah A terhadap luas segitiga BCD. Berdasarkan hasil tersebut mampu diambil kesimpulan jika pendapatan mampu dibagikan dengan total merata akan membuat seluruh titik berada pada garis diagonal.

### 2.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa DAU lebih

digunakan untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin (Shanty Putri & Natha, 2014).

Menurut Halim (2014), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat “block grant”, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Alokasi DAU ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 bahwa Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang selanjutnya akan disalurkan sebesar 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Formulasi DAU:

$$DAU = AD + CF$$

- DAU = Dana Alokasi Umum  
 AD = Alokasi Dasar (Gaji PNS Daerah)  
 CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

$$KbF = TBR (\beta_1 IP + \beta_2 IW + \beta_3 IPM + \beta_4 IKK + \beta_5 IPDRB/kap)$$

- KbF = Kebutuhan Fiskal  
 TBR = Total Belanja Rata – rata APBD  
 IP = Indeks Jumlah Penduduk  
 IW = Indeks Luas Wilayah  
 IPM = Indeks Pembangunan Manusia  
 IKK = Indeks Kemahalan konstruksi

IPDRB/kap = Indeks Produk Regional Bruto per kapita  
 $\beta$  = Bobot Indeks

$$\mathbf{KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA}$$

KpF = Kapasitas Fiskal  
 PAD = Pendapatan Asli Daerah  
 DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak  
 DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan SDA

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Natha (2014) mengatakan bahwa DAU dapat memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin besar DAU maka ketimpangan akan semakin tinggi. DAU berperan dalam mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah atau dengan kata lain pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal fiscal imbalance) (Sriningsih & Yasin, 2009).

### 2.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang berasal dari APBN. Dana tersebut ditransfer dari pusat ke daerah untuk mendanai kegiatan khusus atau kegiatan tertentu milik daerah yang sejalan dengan prioritas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 162 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan pada pasal 54 dijelaskan 2 tahapan dalam alokasi DAK. 2 tahapan tersebut adalah:

- 1) Menentukan daerah penerima DAK
- 2) Menentukan besaran alokasi DAK untuk tiap daerah.

Daerah mana saja yang menerima DAK harus lolos syarat kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi untuk setiap daerah diputuskan melalui perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penjelasan dari setiap kriteria penentuan DAK seperti dijelaskan di bawah ini:

#### 1. Kriteria Umum

Kriteria umum diformulasikan dari kemampuan fiskal daerah yang dilihat dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan fiskal daerah kemudian dihitung menggunakan indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

#### 2. Kriteria Khusus

Pada kriteria ini, perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah dipergunakan untuk proses penentuannya. Besaran alokasi DAK diukur dengan menggunakan kriteria khusus seperti:

- a) Seluruh kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal atau terpencil.
- b) Daerah yang termasuk ke dalam daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah yang berbatasan dengan negara lain, daerah yang termasuk

dalam rawan banjir atau longsor, daerah yang masuk dalam bagian ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

### 3. Kriteria Teknis

Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Dana alokasi khusus dibagi menjadi dua jenis di antaranya adalah dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Dana yang diberikan kepada daerah dalam rangka mendanai kegiatan khusus fisik disebut DAK fisik. Jenis-jenis dari DAK fisik adalah: 1) DAK reguler, yang bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat; 2) DAK penugasan, yang bertujuan untuk menjamin tercapainya prioritas nasional; 3) DAK afirmasi, yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pembangunan pada lokasi prioritas seperti di daerah pesisir, daerah perbatasan, dan daerah tertinggal. Bidang- bidang yang didanai oleh DAK fisik di antaranya adalah:

- a) pendidikan,
- b) kesehatan dan keluarga berencana,
- c) perumahan dan pemukiman,
- d) pertanian,
- e) kelautan dan perikanan,
- f) industri kecil dan menengah,
- g) pariwisata,
- h) jalan,
- i) irigasi,
- j) air minum,
- k) sanitasi,

- l) pasar,
- m) energi skala kecil,
- n) lingkungan hidup dan kehutanan,
- o) transportasi.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dijelaskan bahwa DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik terdiri atas:

- a) Dana Bantuan Operasional Sekolah,
- b) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD),
- c) Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD),
- d) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah,
- e) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus,
- f) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
- g) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB),
- h) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM),
- i) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk),
- j) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan,
- k) BOP Museum dan Taman Budaya,
- l) Dana Pelayanan Kepariwisata
- m) Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS).

Penelitian yang dilakukan oleh Shenggen Fan, Linxiu Zhang, dan Xiaobo Zhang (2002) di China tahun 2002, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pembangunan infrastruktur pertanian, jalan dan listrik, pendidikan serta

pembangunan di perdesaan terbukti mampu mengurangi kemiskinan dengan meningkatnya produktivitas pertanian (Fan et al., 2002).

Selain itu, penelitian dari Calderón dan Servén menyatakan bahwa tidak hanya kualitas infrastruktur namun juga kuantitas infrastruktur terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan dan memperkecil tingkat ketimpangan pendapatan di 100 negara selama tahun 1960 hingga 2000 (Calderón & Servén, 2004). Dalam penjabaran peruntukan DAK di atas maka DAK pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan operasional yang pada akhirnya dapat menurunkan ketimpangan antar daerah maupun ketimpangan pendapatan.

#### 2.2.4. Dana Bagi Hasil Pajak

Menurut Kementerian Keuangan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah yang ditentukan dengan angka persentase tertentu dari pendanaan Negara. DBH bertujuan untuk menyeimbangkan keuangan antara pusat dan daerah dengan cara pembagian porsi tertentu antara pusat dengan daerah penghasil sehingga memperkecil ketimpangan fiskal. Prinsip pengalokasian DBH yaitu:

1. Prinsip pembagian by origin, artinya DBH dibagi dengan ketentuan bahwa daerah penghasil menerima bagian yang lebih besar dari daerah lainnya yang masih dalam provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan besaran dana seperti ditetapkan pada UU No 33/2004.
2. Prinsip penyaluran berbasis atau sesuai dengan realisasi penerimaan Negara yang dibagihasilkan (based on actual revenue), sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 33/2004.

Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Penjelasan lebih rinci seperti di bawah:



- a) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh pemerintah pusat.
- b) DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) berasal dari penerimaan pajak penghasilan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang termasuk dalam PPh di antaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29.
- c) DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil tembakau

DBH bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah, supaya tiap daerah memiliki kekuatan keuangan yang sama sehingga dapat memperkecil ketimpangan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan temuan dari Wanti Oktaviani, Zulgani dan Rosmeli yang menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Jambi tahun 2001-2016 (Oktaviani, 2017) . Namun penelitian dari Muhamad Sidik, Syurya Hidayat, dan Muhammad Ridwansyah yang dilakukan di Provinsi Jambi justru menemukan hal yang sebaliknya. Mereka menemukan bahwa DBH tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah Jambi tahun 2010-2019 (Sidik, Hidayat, & Ridwansyah, 2020).

#### 2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori model Neo-Klasik yang dimulai oleh Goerge H. Bort pada tahun 1960 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah ditentukan dari kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan kegiatan produksinya (Syafriзал, 2014). Menurut Kuznets dalam Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi dalam jangka panjang suatu negara sehingga mampu menyediakan banyak barang ekonomi untuk penduduknya.

Menurut Myrdal (1976) dalam proses pembangunan akan menciptakan dua macam dampak, yaitu *backwash effect* dan *spread effect*. *Backwash effect* menerangkan bahwa pembangunan suatu daerah akan menghambat pembangunan

daerah sekitarnya sedangkan spread effect menerangkan bahwa pembangunan suatu daerah akan memacu pembangunan daerah sekitarnya. Ketimpangan regional yang terjadi dikarenakan kuatnya arus *backwash effect* dan terlalu lemahnya *spread effect*. Neo-Klasik menerangkan bahwa ketimpangan justru meningkat pada tahap awal pembangunan di negara sedang berkembang. Masalah ini disebabkan karena daerah yang memiliki kondisi pembangunan yang relatif sudah maju akan memiliki peluang dan kesempatan pembangunan yang lebih baik dibandingkan pada daerah yang kondisi pembangunannya lebih terbelakang. Hal ini karena daerah yang kurang maju tidak memiliki infrastruktur yang cukup maju dan kualitas SDM yang masih rendah. Faktor yang dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah selain faktor ekonomi juga terdapat faktor sosial-budaya (Myrdal, 1976).

Penelitian yang dilakukan oleh Lundberg dan Squire tahun 2003 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan dibarengi dengan ketimpangan pendapatan yang meningkat pula (Lundberg & Squire, 2003). Pembangunan memiliki makna bahwa terjadi peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Pembangunan suatu daerah akan berimplikasi terhadap menurunnya tingkat ketimpangan penduduk. Hal ini terjadi karena dengan pembangunan ekonomi yang terjadi akan meningkatkan kapasitas produksi di tiap daerah sehingga kenaikan output produksi akan meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Taylor (1975) dalam Sukirno (Sukirno, 1985), menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan persentase kontribusi berbagai sektor ekonomi pada produksi nasional memiliki hubungan terhadap perubahan struktur ekonomi. Menurutnya, perbedaan dalam keunggulan komparatif pada tiap negara menyebabkan pergeseran antara sektor primer menjadi sektor sekunder sehingga dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah. Negara yang keunggulan komparatifnya terdapat pada sektor primer akan

berusaha untuk meningkatkan produksi pada sektor primer, sedangkan negara yang keunggulan komparatifnya terdapat pada sektor sekunder akan berusaha untuk meningkatkan produksinya pada sektor sekunder. Permasalahannya adalah ketika pendapatan seseorang meningkat maka kecenderungan yang terjadi adalah seseorang itu akan meningkatkan pembelian untuk sektor sekunder dan mengurangi pembelian untuk sektor primer. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah semakin tajam.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah menggunakan DAU selain untuk kebutuhan belanja pegawai juga untuk belanja modal atau pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata pada akhirnya mampu meningkatkan roda perekonomian di daerah sehingga kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dapat tercapai. Pada akhirnya, DAU diduga dapat berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan atau kenaikan DAU dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. DAK dibagi menjadi 2 jenis yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. Terdapat beberapa bidang yang mendapat

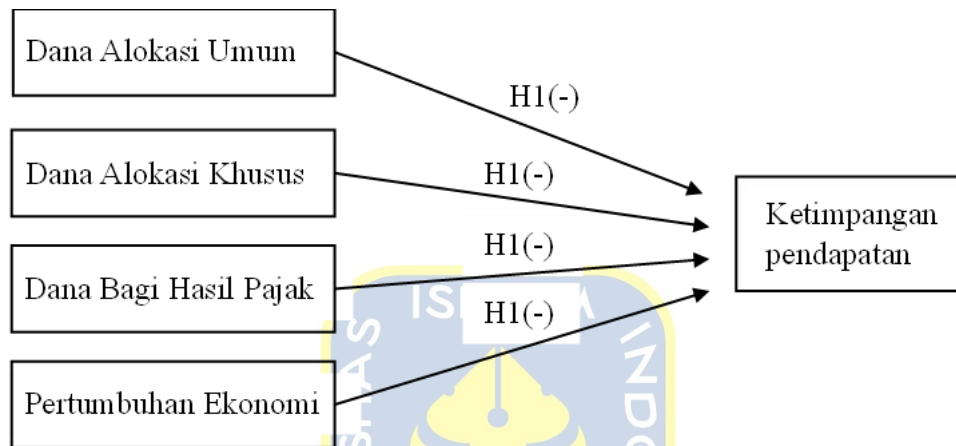
pembiayaan dari DAK fisik seperti bidang pendidikan, bidang infrastruktur jalan, irigasi, sanitasi, perumahan dan lain-lain. Sedangkan DAK non fisik seperti tunjangan gaji guru pegawai negeri sipil daerah, bantuan operasional sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), dan lain-lain. Pemberian DAK pada dasarnya dapat membantu daerah dalam melaksanakan proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, DAK diduga dapat berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan atau kenaikan DAK dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

DBH pajak adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah yang ditentukan dengan angka persentase tertentu dari pendanaan Negara. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Program pemerataan kemampuan keuangan daerah diatasi dengan pemberian sebagian porsi DBH Pajak kepada daerah lain diluar daerah yang bersangkutan / daerah penghasil. Sehingga DBH Pajak mampu memperkecil gap kemampuan fiskal antar daerah antara daerah penghasil dan daerah non penghasil. Pada akhirnya, DBH Pajak diduga dapat berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan atau kenaikan DBH pajak dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jumlah produksi di suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka berarti jumlah produksi ataupun output nasional yang dimiliki suatu negara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak dari kenaikan output nasional atau pertumbuhan ekonomi adalah terjadi proses pembangunan yang semakin meningkat dengan kenaikan dari pendapatan perkapita masyarakat. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi diduga dapat berpengaruh negatif terhadap

ketimpangan pendapatan atau kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran



#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian para ahli yang sudah dijabarkan pada kajian pustaka di atas maka dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Diduga Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang kita peroleh dari sumber kedua dan biasanya data ini sudah siap pakai (Widarjono, Statistika Terapan Dengan Excel dan SPSS, 2019). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berjenis data panel. Data panel adalah gabungan antara *time series* dan *cross section*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Dana Alokasi Umum 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 bersumber dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Badan Pusat Statistik.
2. Data Dana Alokasi Khusus 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 bersumber dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Badan Pusat Statistik.
3. Data Dana Bagi Hasil Pajak 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 bersumber dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Badan Pusat Statistik.
4. Data pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik Laju Pertumbuhan (Y on Y) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (2010=100) (Persen).
5. Data Rasio Gini 34 provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik Gini Ratio Perkotaan + Perdesaan Semester I (Maret).

Data bersumber dari Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015 – 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) dan informasi yang telah disediakan di website Badan Pusat Statistik (BPS).

### 3.2. Definisi Variabel Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu variabel independen dan variabel dependen

#### a. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Dana Alokasi Umum (X1)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan oleh pusat kepada daerah dengan tujuan untuk memperkecil gap fiskal antar daerah sehingga daerah mampu memenuhi kebutuhannya.

##### 2. Dana Alokasi Khusus (X2)

DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang berasal dari APBN. Dana tersebut ditransfer dari pusat ke daerah untuk mendanai kegiatan khusus atau kegiatan tertentu milik daerah yang sejalan dengan prioritas nasional.

##### 3. Dana Bagi Hasil Pajak (X3)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah yang ditentukan dengan angka persentase tertentu dari pendanaan Negara. DBH bertujuan untuk menyeimbangkan keuangan antara pusat dan daerah dengan cara pembagian porsi tertentu antara pusat dengan daerah penghasil.

##### 4. Pertumbuhan ekonomi (X4)

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang

ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan PDRB tiap provinsi di Indonesia.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Gini Ratio 34 provinsi di Indonesia yang diambil dari Badan Pusat Statistik yang berkisar antara 0 – 1.

### 3.3. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari suatu sampel (Widarjono, 2018). Gabungan dari *time series* dan *cross section* disebut dengan data panel. Dalam data panel setiap variabel memiliki  $i$  dan  $t$  yang berarti  $i$  adalah banyak jumlah individu dan  $t$  adalah banyaknya waktu. Data panel memiliki 2 jenis yaitu *balanced panel* dan *unbalanced panel*. *Balanced panel* ketika unit waktu ( $t$ ) sama untuk semua individu, sedangkan *unbalanced panel* ketika unit waktu ( $t$ ) tidak sama untuk semua individu. Penulis menggunakan *balanced panel* dalam penelitian ini.

Terdapat 3 model untuk estimasi data panel yang nanti selanjutnya akan ditentukan model terbaik di antara ketiga model tersebut. Ketiga model tersebut adalah *Common Effect model*, *Fixed Effect model* dan *Random Effect model*.

#### 3.3.1. Metode Common Effect

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu



maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

i = *cross section*

t = *time series*

### 3.3.2. Metode *Fixed Effect*

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersepnya berbeda. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan *dummy variabel* untuk melihat adanya perbedaan pada intersep. Perbedaan intersep antara cross-section namun intersepnya sama antar waktu. Selain itu, dalam model *fixed effect* juga diasumsikan jika koefisien regresi (*slope*) tetap antar provinsi antar waktu (Widarjono, 2018)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 D_{1i} + \beta_6 D_{2i} \dots + e_{it}$$

Keterangan:

D = Dummy

### 3.3.3. Metode *Random Effect*

Pada Model ini variabel gangguan mungkin saling berkorelasi antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* pada setiap *cross section*. Kelebihan dalam menggunakan model *Random Effect* yaitu dapat menghilangkan *heteroskedastisitas*. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + v_{it} \quad v_{it} = e_{it} + u_i$$

Persamaan dalam *random effect* dapat dituliskan seperti persamaan di atas. Nama metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan  $v_{it}$  terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh  $e_{it}$ . Dalam hal ini variabel gangguan  $u_i$  adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu.

#### 3.3.4. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan teknik terbaik di antara *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Hipotesis dalam uji Chow adalah:

$H_0 = \text{Common Effect}$  merupakan model terbaik

$H_a = \text{Fixed Effect}$  merupakan model terbaik

$H_0$  akan diterima sehingga *common effect* adalah model terbaik ketika probabilitas dari *Chi-square* bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, sedangkan  $H_0$  akan ditolak dan akan menerima  $H_a$  sehingga dikatakan model *fixed effect* adalah model terbaik ketika probabilitas dari *Chi-square* bernilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan.

#### 3.3.5. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dipakai untuk mengetahui model mana yang terbaik antara *Common Effect* atau *Random Effect*. Uji LM ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi model *random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Hipotesis dalam uji LM adalah:

$H_0 = \text{Common Effect}$  merupakan model terbaik

$H_a = \text{Random Effect}$  merupakan model terbaik

$H_0$  akan diterima sehingga *common effect* adalah model terbaik ketika probabilitas dari *Breusch-Pagan Cross-section* bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, sedangkan  $H_0$  akan ditolak dan akan menerima  $H_a$

sehingga dikatakan model *random effect* adalah model terbaik ketika probabilitas dari *Breusch-Pagan Cross-section* bernilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan.

### 3.3.6. Uji Hausmann

Uji Hausmann digunakan untuk menentukan teknik terbaik di antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hipotesis dari pengujian uji Hausman adalah sebagai berikut:

$H_0$  = *Random Effect* merupakan model terbaik

$H_a$  = *Fixed Effect* merupakan model terbaik

$H_0$  akan diterima sehingga *Random effect* adalah model terbaik ketika probabilitas dari *Cross-section random* bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, sedangkan  $H_0$  akan ditolak dan akan menerima  $H_a$  sehingga dikatakan model *Fixed effect* adalah model terbaik ketika probabilitas dari *Cross-section random* bernilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan.

## 3.4. Uji Signifikansi

### 3.4.1. Uji Simultan F

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai prob F statistik < taraf signifikansi ( $\alpha$ ) maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai prob F statistik > taraf signifikansi ( $\alpha$ ) maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.4.2. Uji Parsial T

Uji t merupakan suatu prosedur di mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol. Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu dalam

menjelaskan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas setiap variabel independen. Ketika nilai prob tiap variabel independen  $<$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) maka hipotesis nol ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai prob variabel independen  $>$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) maka gagal menolak hipotesis nol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.4.3. Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Koefisien determinasi membahas tentang kebaikan garis regresi. Dengan mengetahui seberapa besar koefisien determinasi maka dapat diketahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Garis regresi sempurna saat seluruh data terletak pada garis regresi. Namun kondisi tersebut sangat jarang terjadi. Biasanya yang terjadi adalah  $\hat{\epsilon}_i$  dapat bertanda positif ataupun bertanda negatif. Ketika hal tersebut terjadi berarti garis regresi yang terbentuk bukanlah garis regresi seratus persen sempurna. Harapannya adalah memperoleh garis regresi yang menghasilkan  $\hat{\epsilon}_i$  sekecil mungkin. Nilai *R-Squared* menunjukkan ketika semakin besar angka tersebut maka semakin baik model yang dibuat.

#### 3.5. Persamaan Model Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program Eviews 12 *Student lite version*. Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang meliputi: *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

Adapun bentuk model regresi data panel dalam penelitian ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

Y = Rasio Gini

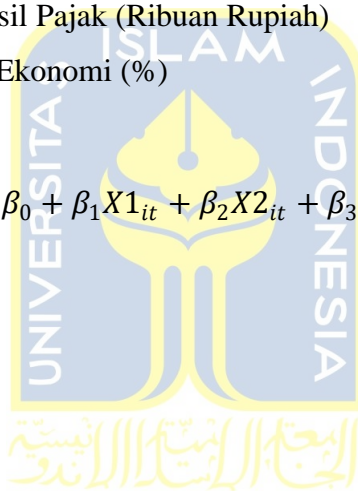
X1 = Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)

X2 = Dana Alokasi Khusus (Ribuan Rupiah)

X3 = Dana Bagi Hasil Pajak (Ribuan Rupiah)

X4 = Pertumbuhan Ekonomi (%)

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel pada 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2015 – 2020. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik yaitu Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Badan Pusat Statistik untuk data DAU, DAK, dan DBH Pajak serta informasi pada website Badan Pusat Statistik untuk data Gini Ratio dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, dan pertumbuhan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan pada 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2015 – 2020. Metode analisis yang digunakan adalah metode data panel serta menggunakan bantuan software Eviews 12. Data yang digunakan penulis ditampilkan di bawah ini:

Tabel 4.1 Data DAU, DBH Pajak dan DAK tahun 2020 (dalam ribuan rupiah)

Provinsi	DAU	DBH Pajak	DAK
Nanggroe Aceh Darussalam	1.961.334.010	206.211.623	1.814.403.272
Sumatera Utara	2.731.961.034	394.674.173	4.746.209.995
Sumatera Barat	2.106.647.207	108.088.089	2.162.598.913
Riau	1.439.451.620	810.139.155	2.019.575.520
Jambi	1.444.166.395	149.039.606	1.201.394.675
Sumatera Selatan	1.756.924.452	966.313.837	2.494.695.281
Bengkulu	1.350.729.863	36.970.633	207.808.002
Lampung	1.739.916.377	148.368.541	2.262.390.988
Bangka Belitung	1.052.377.716	39.426.053	0
Kepulauan Riau	1.206.473.650	151.747.784	806.088.051
DKI Jakarta	0	18.272.465.990	3.230.470.784
Jawa Barat	3.306.552.702	1.303.788.723	11.417.942.116
Jawa Tengah	3.830.691.947	764.710.178	7.607.305.225
DI Yogyakarta	1.359.606.514	86.640.722	1.127.331.617
Jawa Timur	4.072.075.656	1.358.344.777	8.429.808.252

Banten	1.159.302.397	506.875.077	2.734.752.212
Bali	1.344.031.319	150.459.921	1.292.329.368
Nusa Tenggara Barat	1.484.527.774	183.750.779	1.604.013.784
Nusa Tenggara Timur	1.922.975.903	55.418.382	2.534.311.805
Kalimantan Barat	1.766.686.880	119.818.669	1.712.829.144
Kalimantan Tengah	1.442.656.367	168.589.929	1.101.777.653
Kalimantan Selatan	1.215.803.040	162.968.563	1.207.119.768
Kalimantan Timur	943.411.298	423.223.050	1.259.014.544
Kalimantan Utara	1.205.960.153	88.591.420	199.829.426
Sulawesi Utara	1.488.989.572	76.916.300	1.178.928.790
Sulawesi Tengah	1.662.156.644	67.533.953	1.399.644.243
Sulawesi Selatan	2.357.591.182	293.663.027	2.798.428.832
Sulawesi Tenggara	1.639.676.883	44.372.103	1.338.603.326
Gorontalo	946.452.624	20.465.267	448.148.751
Sulawesi Barat	970.566.678	16.763.597	686.319.793
Maluku	1.721.885.692	37.625.504	1.047.755.445
Maluku Utara	1.377.253.571	34.348.873	779.996.819
Papua Barat	1.461.166.659	135.720.599	704.169.245
Papua	2.625.302.515	229.487.436	1.435.655.811

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa ketimpangan tertinggi berada di Provinsi DIY yang tercatat memiliki nilai gini rasio sebesar 0,435 tahun 2020. Sementara itu, provinsi penerima DAU tertinggi adalah provinsi Jawa Timur dengan menerima DAU sebesar Rp 4.072.075.656.000 sedangkan untuk provinsi DKI Jakarta sudah tidak menerima lagi DAU karena APBD provinsi DKI Jakarta sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan provinsi.

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) tertinggi dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta dengan menerima sebesar Rp 18.272.465.990.000. Provinsi yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar adalah provinsi Jawa Barat dengan alokasi DAK sebesar Rp 11.417.942.116.000.

#### 4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan

Penelitian dianalisis dengan metode data panel. Untuk memilih model terbaik dilakukan beberapa model pengujian di antaranya adalah *Common Effect*, *Fixed*

*Effect* dan *Random Effect*. Pengujian kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji Chow, uji LM dan uji Hausman untuk mengetahui model yang terbaik.

#### 4.2.1. Hasil Estimasi untuk *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect* model

Tabel 4.2 Hasil estimasi model *Common Effect*

Dependent Variable: GR  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 11/10/21 Time: 10:45  
 Sample: 2015 2020  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 34  
 Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.341845	0.007847	43.56358	0.0000
DAU	1.29E-12	5.72E-12	0.225766	0.8216
DAK	2.75E-12	2.09E-12	1.315920	0.1897
BHP	3.52E-12	1.27E-12	2.769715	0.0061
GROWTH	0.001776	0.000700	2.536843	0.0120
R-squared	0.108665	Mean dependent var		0.357755
Adjusted R-squared	0.090749	S.D. dependent var		0.037809
S.E. of regression	0.036053	Akaike info criterion		-3.783458
Sum squared resid	0.258662	Schwarz criterion		-3.702131
Log likelihood	390.9127	Hannan-Quinn criter.		-3.750560
F-statistic	6.065159	Durbin-Watson stat		0.172649
Prob(F-statistic)	0.000126			



Tabel 4.3 Hasil estimasi model *Fixed Effect*

Dependent Variable: GR

Method: Panel Least Squares

Date: 11/10/21 Time: 10:46

Sample: 2015 2020

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.368592	0.004441	82.99399	0.0000
DAU	-7.71E-12	3.30E-12	-2.333082	0.0208
DAK	-1.52E-12	1.17E-12	-1.297076	0.1964
BHP	-3.29E-14	1.90E-12	-0.017333	0.9862
GROWTH	0.000706	0.000246	2.871002	0.0046
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.924980	Mean dependent var	0.357755	
Adjusted R-squared	0.908259	S.D. dependent var	0.037809	
S.E. of regression	0.011452	Akaike info criterion	-5.934894	
Sum squared resid	0.021770	Schwarz criterion	-5.316813	
Log likelihood	643.3592	Hannan-Quinn criter.	-5.684869	
F-statistic	55.31740	Durbin-Watson stat	1.443415	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4.4 Hasil estimasi model *Random Effect*

Dependent Variable: GR

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/10/21 Time: 10:46

Sample: 2015 2020

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 204

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.366375	0.007404	49.48181	0.0000
DAU	-7.23E-12	3.24E-12	-2.235572	0.0265
DAK	-1.25E-12	1.15E-12	-1.086121	0.2787
BHP	1.19E-12	1.54E-12	0.771317	0.4414
GROWTH	0.000767	0.000245	3.132073	0.0020
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.035085	0.9037
Idiosyncratic random			0.011452	0.0963
Weighted Statistics				
R-squared	0.172006	Mean dependent var		0.047255
Adjusted R-squared	0.155363	S.D. dependent var		0.012611
S.E. of regression	0.011590	Sum squared resid		0.026731
F-statistic	10.33500	Durbin-Watson stat		1.170934
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.035966	Mean dependent var		0.357755
Sum squared resid	0.300633	Durbin-Watson stat		0.104115

#### 4.2.2. Pemilihan Model Terbaik

Setelah dilakukan estimasi pada setiap model selanjutnya dilakukan pengujian Uji Chow, Uji LM dan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik.

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: FE  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	54.736236	(33,166)	0.0000
Cross-section Chi-square	504.893008	33	0.0000

Ho: Common Effect adalah model terbaik

Ha: Fixed Effect adalah model terbaik

Diketahui nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar  $0.000 < \alpha 5\%$ .

Dari hasil di atas maka terbukti menolak Ho. Artinya model terbaik adalah model Fixed Effect.

Tabel 4.6 Hasil Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided  
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	362.8775 (0.0000)	0.000820 (0.9772)	362.8783 (0.0000)
Honda	19.04934 (0.0000)	0.028628 (0.4886)	13.49016 (0.0000)
King-Wu	19.04934 (0.0000)	0.028628 (0.4886)	6.936602 (0.0000)
Standardized Honda	20.15865	0.581157	10.98414

	(0.0000)	(0.2806)	(0.0000)
Standardized King-Wu	20.15865 (0.0000)	0.581157 (0.2806)	5.066209 (0.0000)
Gourierioux, et al.*	--	--	362.8783 ( $< 0.01$ )

Ho: Common Effect adalah model terbaik

Ha: Random Effect adalah model terbaik

Diketahui nilai probabilitas Breusch-Pagan Cross-section sebesar  $0.000 < \alpha$  5%. Dari hasil di atas maka terbukti menolak Ho. Artinya model terbaik adalah model Random Effect.

Tabel 4.7 Hasil Uji Hausmann

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.824125	4	0.0656

Ho: *Random Effect* adalah model terbaik

Ha: *Fixed Effect* adalah model terbaik

Diketahui nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar  $0.0656 > \alpha$  5%. Dari hasil di atas maka terbukti gagal menolak Ho. Artinya model terbaik adalah model *Random Effect*. Menurut Gujarati & Porter (2009), persamaan yang memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Dalam eviws model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya *random effect model*, sedangkan *fixed effect* dan *common effect* menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Model terbaik dalam penelitian ini adalah model *Random Effect* maka dari itu uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan.

#### 4.2.3. Uji Kelayakan Model Signifikansi F

Berdasarkan hasil uji Eviews didapatkan F-statistic sebesar 10,335 dan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  maka menolak  $H_0$ . Artinya adalah model yang diestimasi layak digunakan dan terbukti bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015 – 2020.

#### 4.2.4. Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Berdasarkan data pada Eviews diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar 0,172 atau 17,2%. Hal ini berarti bahwa variabel ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, DBH Pajak dan pertumbuhan ekonomi sebesar 17,2% sedangkan sisanya sebesar 82,8% dijelaskan variabel lain di luar model.

#### 4.2.5. Uji Parsial (t-test)

##### 1. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil estimasi Eviews diketahui bahwa nilai t statistik untuk variabel DAU sebesar -2,23 dan nilai prob sebesar  $0,02 < \alpha = 0,05$  maka menolak  $H_0$ . Artinya adalah variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien sebesar  $-7,23E-12$  artinya ketika DAU meningkat sebesar Rp 1.000,- maka ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 0,000000000000723. Hal ini berimplikasi bahwa Dana Alokasi Umum yang diberikan pusat ke daerah mampu berkontribusi dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan daerah meskipun kontribusinya tidak cukup besar.

##### 2. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan hasil estimasi Eviews diketahui bahwa nilai t-statistik untuk variabel DAK sebesar -1,086 dan nilai prob sebesar  $0,2787 > \alpha = 0,05$  maka gagal

menolak  $H_0$ . Artinya adalah variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

### 3. Variabel Bagi Hasil Pajak (BHP)

Berdasarkan hasil estimasi Eviews diketahui bahwa nilai t-statistik untuk variabel DAK sebesar 0,7713 dan nilai prob sebesar  $0,4414 > \alpha = 0,05$  maka gagal menolak  $H_0$ . Artinya adalah variabel Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

### 4. Variabel pertumbuhan ekonomi (GROWTH)

Berdasarkan hasil estimasi Eviews diketahui bahwa nilai t-statistik untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 3,13 dan nilai prob sebesar  $0,002 < \alpha = 0,05$  maka menolak  $H_0$ . Artinya adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien sebesar 0,000767 artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 0,000767.

#### 4.2.6. Persamaan Regresi

Hasil output Eviews menunjukkan hasil *Cross-section Random Effects* pada setiap provinsi dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 *Cross-section Random Effects*

No	Provinsi	Effect	Perhitungan nilai intersep	Hasil intersep
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-0,0262	$0,366 - 0,0262$	0,3398
2	Sumatera Utara	-0,0283	$0,366 - 0,0283$	0,3377
3	Sumatera Barat	-0,0332	$0,366 - 0,0332$	0,3328
4	Riau	-0,0205	$0,366 - 0,0205$	0,3455
5	Jambi	-0,0222	$0,366 - 0,0222$	0,3438
6	Sumatera Selatan	-0,0087	$0,366 - 0,0087$	0,3573
7	Bengkulu	-0,0069	$0,366 - 0,0069$	0,3591
8	Lampung	-0,0099	$0,366 - 0,0099$	0,3561
9	Bangka Belitung	-0,0843	$0,366 - 0,0843$	0,2817
10	Kepulauan Riau	-0,0171	$0,366 - 0,0171$	0,3489
11	Dki Jakarta	0,0218	$0,366 + 0,0218$	0,3878

12	Jawa Barat	0,0628	$0,366 + 0,0628$	0,4288
13	Jawa Tengah	0,0273	$0,366 + 0,0273$	0,3933
14	Di Yogyakarta	0,0687	$0,366 + 0,0687$	0,4347
15	Jawa Timur	0,0463	$0,366 + 0,0463$	0,4123
16	Banten	0,0214	$0,366 + 0,0214$	0,3874
17	Bali	0,0138	$0,366 + 0,0138$	0,3798
18	Nusa Tenggara Barat	0,0123	$0,366 + 0,0123$	0,3783
19	Nusa Tenggara Timur	-0,0055	$0,366 - 0,0055$	0,3605
20	Kalimantan Barat	-0,0245	$0,366 - 0,0245$	0,3415
21	Kalimantan Tengah	-0,0237	$0,366 - 0,0237$	0,3423
22	Kalimantan Selatan	-0,0209	$0,366 - 0,0209$	0,3451
23	Kalimantan Timur	-0,0359	$0,366 - 0,0359$	0,3301
24	Kalimantan Utara	-0,0609	$0,366 - 0,0609$	0,3051
25	Sulawesi Utara	0,0206	$0,366 + 0,0206$	0,3866
26	Sulawesi Tengah	-0,0122	$0,366 - 0,0122$	0,3538
27	Sulawesi Selatan	0,0512	$0,366 + 0,0512$	0,4172
28	Sulawesi Tenggara	0,0393	$0,366 + 0,0393$	0,4053
29	Gorontalo	0,0509	$0,366 + 0,0509$	0,4169
30	Sulawesi Barat	0,0017	$0,366 + 0,0017$	0,3677
31	Maluku	-0,0224	$0,366 - 0,0224$	0,3436
32	Maluku Utara	-0,0558	$0,366 - 0,0558$	0,3102
33	Papua Barat	0,0356	$0,366 + 0,0356$	0,4016
34	Papua	0,0454	$0,366 + 0,0454$	0,4114

Dari hasil *Cross-section Random Effects* model pada tabel 4.2.6.1 dapat diketahui Provinsi DIY memiliki nilai intersep ketimpangan pendapatan tertinggi sebesar 0,4347 disusul dengan provinsi Jawa Barat sebesar 0,4288 dan Sulawesi Selatan sebesar 0,4172. Sedangkan provinsi dengan nilai intersep terendah adalah provinsi Bangka Belitung sebesar 0,2817. Hasil persamaan regresi untuk setiap provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Persamaan Regresi setiap Provinsi

Provinsi	Persamaan Regresi
Nanggroe Aceh Darussalam	$GR = 0.3398 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Sumatera Utara	$GR = 0.3377 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Sumatera Barat	$GR = 0.3328 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Riau	$GR = 0.3455 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Jambi	$GR = 0.3438 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Sumatera Selatan	$GR = 0.3573 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Bengkulu	$GR = 0.3591 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Lampung	$GR = 0.3561 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Bangka Belitung	$GR = 0.2817 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Kepulauan Riau	$GR = 0.3489 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Dki Jakarta	$GR = 0.3878 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Jawa Barat	$GR = 0.4288 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Jawa Tengah	$GR = 0.3933 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Di Yogyakarta	$GR = 0.4347 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Jawa Timur	$GR = 0.4123 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$



Banten	$GR = 0.3874 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Bali	$GR = 0.3798 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Nusa Tenggara Barat	$GR = 0.3783 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Nusa Tenggara Timur	$GR = 0.3605 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Kalimantan Barat	$GR = 0.3415 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Kalimantan Tengah	$GR = 0.3423 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Kalimantan Selatan	$GR = 0.3451 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Kalimantan Timur	$GR = 0.3301 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Kalimantan Utara	$GR = 0.3051 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Sulawesi Utara	$GR = 0.3866 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Sulawesi Tengah	$GR = 0.3538 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Sulawesi Selatan	$GR = 0.4172 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Sulawesi Tenggara	$GR = 0.4053 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Gorontalo	$GR = 0.4169 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Sulawesi Barat	$GR = 0.3677 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Maluku	$GR = 0.3436 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$

Maluku Utara	$GR = 0.3102 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Papua Barat	$GR = 0.4016 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$
Papua	$GR = 0.4114 - (7,23E-12)DAU - (1,25E-12)DAK + (1,19E-12)BHP + 0,000767Growth$

#### 4.2.6.1. Pengaruh DAU terhadap ketimpangan pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai prob sebesar  $0,0265 < \alpha$  (5%). Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun DAU yang diberikan pusat kepada daerah telah terbukti mampu mengurangi ketimpangan namun besaran kontribusinya sangat sedikit. Hal ini dikarenakan DAU sebagian besar masih digunakan untuk belanja pegawai, sementara DAK baru digunakan untuk belanja modal.

#### 4.2.6.2. Pengaruh DAK terhadap ketimpangan pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Nilai prob DAK sebesar  $0.278 > \alpha$  (5%). Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. DAK yang selama ini diberikan masih belum mampu mengatasi ketimpangan pendapatan di daerah. Hal ini disebabkan karena arah kegiatan DAK yang masih ditujukan untuk bidang – bidang yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selama ini alokasi DAK hanya diberikan pada bidang – bidang dasar seperti bidang infrastruktur sanitasi, infrastruktur jalan, bidang kehutanan, bidang keselamatan transportasi darat dan lain sebagainya. Bidang DAK memang digunakan untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP) namun hal itu masih belum cukup karena tidak dilanjutkan untuk mencapai kualifikasi

tinggi yakni SMA/SMK sehingga masih belum mampu untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung.

Permasalahan dalam pengalokasian dan penggunaan DAK turut menyebabkan proses pembangunan daerah tidak berjalan optimal sehingga tidak mampu memberikan pengaruh terhadap upaya pengentasan ketimpangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU (2008) menyatakan bahwa faktor nepotisme dan/atau kedekatan personal antara birokrat pemerintah dan pihak penerima proyek, seperti kepala sekolah atau kepala puskesmas, ikut mewarnai penetapan proyek DAK. Sebagai contoh di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2006, ditemukan bahwa terdapat 5 SD yang mendapatkan DAK padahal kenyataannya 5 SD tersebut tidak layak mendapat DAK. Kemudian di tahun 2007, ditemukan lagi di Kabupaten Wonogiri bahwa rencana rehabilitasi gedung SD yang tidak tepat sasaran. Tercatat sebanyak 29 usulan dari 88 usulan rencana rehabilitasi SD dibatalkan karena dinilai tidak tepat sasaran. Penetapan proyek DAK yang tidak tepat sasaran seperti ini juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Hal ini membuat kualitas pendidikan tiap daerah berbeda yang menyebabkan kualitas SDM masyarakat menjadi timpang. Perbedaan kualitas SDM inilah yang kemudian dapat menciptakan kondisi ketimpangan pendapatan semakin tajam.

Persoalan petunjuk teknis dalam penggunaan DAK yang tidak sesuai dengan kondisi daerah juga turut menyebabkan DAK tidak dapat berkontribusi terhadap upaya pengurangan ketimpangan. Temuan yang dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU menemukan bahwa Kabupaten Kupang lebih membutuhkan pembangunan jalan daripada pemeliharaan jalan. Namun dalam petunjuk teknis pengaturan DAK oleh pemerintah pusat menyatakan untuk pemeliharaan jalan dialokasikan sebanyak 70% DAK bidang infrastruktur jalan sedangkan untuk pembangunan jalan hanya 30% nya saja yang boleh digunakan.

#### 4.2.6.3. Pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap ketimpangan pendapatan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa bagi hasil pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai prob sebesar  $0,4414 > \alpha$  (5%). Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa bagi hasil pajak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data pada tabel 4.1 diketahui bahwa provinsi penerima DBH pajak terbesar adalah provinsi DKI Jakarta disusul dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Daerah yang infrastrukturnya sudah maju dan kemampuannya tinggi cenderung akan menerima porsi DBH Pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih terbelakang. Dana bagi hasil pajak diperuntukkan untuk mengatasi kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah serta kesenjangan horizontal. Besaran alokasi DBH Pajak didasarkan atas prinsip *by origin* maka daerah penghasil akan memperoleh dana bagi hasil pajak yang lebih besar dibandingkan daerah lain di dalam provinsi tersebut. Sedangkan besaran alokasi untuk DBH PBB adalah 10% untuk pemerintah yang kemudian dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota dan 90% untuk daerah yang bersangkutan. Kemudian untuk DBH PPh hanya 20% saja porsi yang dibagikan kepada daerah. Dari 20% tersebut dibagi menjadi 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan rincian 8,4% untuk kabupaten/kota yang terdaftar wajib pajak dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan porsi sama besar. Dari pembagian porsi di atas maka jatah yang diterima seluruh kabupaten/kota di luar daerah yang bersangkutan sangatlah kecil. Hal ini membuat daerah yang tertinggal akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya meskipun sudah menerima dana bagi hasil pajak. Perbedaan kondisi pada tiap daerah inilah yang menyebabkan kemampuan tiap daerah dalam melaksanakan pembangunan menjadi tidak sama sehingga pada akhirnya proses pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lambat.

#### 4.2.6.4. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai prob sebesar  $0,002 < \alpha$  (5%). Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kuznets (1955) mengatakan bahwa dalam jangka pendek semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin lebar juga jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Sedangkan dalam jangka panjang peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa transfer dana perimbangan memang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru menciptakan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukanlah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *trickle down effect*, di mana teori tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan ada bagian dari pertumbuhan ekonomi tersebut yang menetes ke bawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Menurut laporan Bank Dunia (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya dinikmati oleh 20% masyarakat kelompok terkaya saja. Dari kondisi tersebut dapat dilihat telah terjadi *polarization effect*, di mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru semakin meningkatkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Polarization effect menjelaskan tentang ketidakterkaitan antar sektor yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemajuan pada sektor padat modal (*capital intensive*) jauh lebih besar dibandingkan pada sektor padat karya (*labour intensive*) sehingga sektor padat modal mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor padat karya. Hal ini berakibat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya dinikmati oleh

masyarakat kaya yang kegiatan ekonominya ditunjang oleh industri sedangkan mayoritas masyarakat masih berada pada kelompok menengah ke bawah yang kegiatan ekonominya masih ditunjang sektor pertanian. Kondisi seperti ini membuat jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka hasil penelitian “**Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia**” dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Jumlah dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kesimpulannya adalah ketika jumlah dana alokasi umum ditingkatkan maka ketimpangan pendapatan di Indonesia akan berkurang.
2. Jumlah dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya ketika jumlah dana alokasi khusus ditingkatkan oleh pemerintah maka masih belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Beberapa penyebabnya antara lain adalah arah kegiatan pada berbagai bidang yang dibiayai oleh DAK tidak mampu berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Bidang – bidang yang selama ini dibiayai oleh DAK hanyalah bidang – bidang dasar saja seperti bidang infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, infrastruktur irigasi dan lain sebagainya. Selain itu, mis alokasi DAK dan ketidaksesuaian aturan porsi anggaran dengan kebutuhan di daerah juga turut menyebabkan DAK tidak mampu berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat.
3. Jumlah dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti alokasi dana bagi hasil pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga tidak dapat memberikan dampak terhadap upaya pengurangan ketimpangan pendapatan. Beberapa penyebabnya antara lain

adalah daerah yang infrastrukturnya sudah maju dan kemampuan ekonominya lebih tinggi cenderung akan menerima porsi DBH Pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih terbelakang. Selain itu, porsi DBH Pajak yang diterima oleh seluruh kabupaten/kota di luar daerah yang bersangkutan sangatlah kecil. Hal ini membuat daerah yang tertinggal akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya meskipun sudah menerima dana bagi hasil pajak.

4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin timpang pula kondisi ketimpangan pendapatannya. Penyebab ketimpangan semakin lebar meskipun pertumbuhan ekonomi semakin meningkat karena telah terjadi polarization effect, di mana sektor padat modal mengalami kemajuan yang lebih tinggi dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan sektor padat karya. Sektor padat modal dikuasai oleh segelintir kelompok kaya sedangkan mayoritas besar masyarakat Indonesia masih berada pada sektor padat karya seperti sektor pertanian. Minimnya akses sebagian besar kelompok masyarakat Indonesia terhadap sektor padat modal menyebabkan semakin timpangnya kondisi ketimpangan pendapatan.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis di atas maka terdapat beberapa implikasi kebijakan di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU mampu berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Pemerintah pusat perlu untuk meningkatkan besaran DAU yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Selain itu besaran belanja pegawai oleh pemerintah daerah yang



berasal dari DAU perlu untuk dikurangi dan digunakan lebih banyak untuk belanja modal supaya perekonomian daerah mampu tumbuh dan berkembang.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh kepada ketimpangan pendapatan. Pemerintah perlu untuk meningkatkan pengawasan realisasi belanja DAK supaya DAK yang diberikan pusat ke daerah mampu lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu untuk melakukan deregulasi terkait urusan teknis penentuan porsi arah kegiatan DAK yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan juga memberikan program alokasi DAK untuk dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Porsi pembagian DBH Pajak yang selama ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang tidak bersangkutan perlu untuk lebih ditingkatkan supaya kemampuan keuangan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan masing-masing daerah mampu lebih merata.
4. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif perlu untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah. Upaya redistribusi pendapatan melalui pajak perlu untuk terus ditingkatkan oleh pemerintah. Kegiatan migrasi penduduk ke daerah yang sudah maju juga perlu untuk diawasi. Penduduk yang semakin terkonsentrasi di daerah maju menyebabkan upaya pembangunan antar daerah akan semakin tidak merata. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan stimulus kepada sektor padat karya yang telah mampu menyerap banyak tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I., & Morris, T. C. (1973). *Economic growth and social equity in developing countries*. California: Stanford University Press.
- Akai, N., & Sakata, M. (2005). Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States. *CIRJE*.
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 1-11.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ashfahany, A. E., Djuuna, R. F., & Rofiq, N. F. (2020). Does Fiscal Decentralization Increases Regional Income Inequality In Indonesia? *Jambura Equilibrium Journal*, 68-80.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2012-2015*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2019*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah*. Retrieved from [www.bps.go.id:https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5](http://www.bps.go.id:https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab5)
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laju Pertumbuhan (Y on Y) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (2010=100) (Persen)*. Retrieved from [www.bps.go.id: https://www.bps.go.id/subject/171/produk-domestik-regional-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab5](http://www.bps.go.id:https://www.bps.go.id/subject/171/produk-domestik-regional-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab5)

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*. Jakarta: BPS RI.
- Baldwin, R. E. (1986). *Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Negara Berkembang*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bank Dunia. (2015). *Indonesia's rising divide*. Jakarta: World Bank.
- Calderón, C., & Servén, L. (2004). *The Effects Of Infrastructure Development On Growth And Income Distribution*. Santiago de Chile: Central Bank of Chile.
- Chambers, D. (2010). Does a rising tide raise all ships? The impact of growth on inequality. *Applied Economics Letters*, 581–586.
- Fan, S., Zhang, L., & Zhang, X. (2002). *Growth, inequality, and poverty in rural China: the role of public investments*. Washington DC: International Food Policy Research Institute.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. New York: Douglas Reiner.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, J. T. (2015, Agustus 31). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Retrieved from [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya/>
- Herdiana, D. (2019). Hubungan Realisasi Transfer DAU dan DAK terhadap Kesenjangan Horizontal di Indonesia Study terhadap 33 Provinsi Periode Tahun 2009-2013. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 67-75.

- Ismail, Y. R., Arham, M. A., & S, S. I. (2019). Analysis Of Village Dau, Dak, And Funds On Inequality Distribution Income And Growth In Indonesia 2015-2018. *Jambura Equilibrium Journal*, 83-93.
- Kuznet, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 1-28.
- Lembaga Penelitian SMERU. (2008). *Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta.
- Lundberg, M., & Squire, L. (2003). The simultaneous evolution of growth and inequality. *The Economic Journal*, 326-344.
- Myrdal, G. (1976). *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Oktaviani, W. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 105-112.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Rubin, A., & Segal, D. (2015). The effects of economic growth on income inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*, 258-273.
- Schnellenbach, J., Baskaran, T., & Feld, L. P. (2014). Fiscal federalism, decentralization and economic growth: A meta-analysis. *Working Paper*.
- Shanty Putri, N. V., & Natha, S. I. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi

Pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4, 41-49.

Sidik, M., Hidayat, S., & Ridwansyah, M. (2020). Dampak Alokasi Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) Terhadap Tingkat Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 229-238.

Sriningsih, S., & Yasin, M. (2009). Dampak Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 148 - 162.

Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: LPFE-UI.

Syafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Vol. Edisi 9). Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wahiba, N. F., & Weriemmi, M. E. (2014). The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality. *International Journal of Economics and Financial Issues* , 135-143.

Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 111-118.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Widarjono, A. (2019). *Statistika Terapan Dengan Excel dan SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



### LAMPIRAN

Data Rasio Gini, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015 – 2020.

Provinsi	Tahun	Rasio Gini	Dana Alokasi Umum (000 Rupiah)	Dana Alokasi Khusus (000 Rupiah)	Bagi Hasil Pajak (000 Rupiah)	Pertumbuhan ekonomi (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	2015	0,334	1.237.894.986	88.582.570	274.769.551	-0,73
Nanggroe Aceh Darussalam	2016	0,333	1.263.870.989	129.982.373	157.902.741	3,29
Nanggroe Aceh Darussalam	2017	0,329	2.060.263.235	1.489.203.024	219.963.360	4,18
Nanggroe Aceh Darussalam	2018	0,325	2.060.263.235	1.483.635.795	159.603.546	4,61
Nanggroe Aceh Darussalam	2019	0,32	2.322.266.506	1.744.873.155	113.615.983	4,14
Nanggroe Aceh Darussalam	2020	0,323	1.961.334.010	1.814.403.272	206.211.623	-0,37
Sumatera Utara	2015	0,336	1.349.132.276	0	460.776.895	5,10
Sumatera Utara	2016	0,319	1.604.505.673	3.103.684.863	486.455.044	5,18
Sumatera Utara	2017	0,315	2.629.224.545	3.838.053.061	446.154.989	5,12
Sumatera Utara	2018	0,318	2.629.224.545	3.912.060.868	455.531.998	5,18
Sumatera Utara	2019	0,32	2.713.750.553	4.205.592.917	322.412.068	5,22
Sumatera Utara	2020	0,316	2.731.961.034	4.746.209.995	394.674.173	-1,07
Sumatera Barat	2015	0,342	1.221.128.606	62.731.100	145.582.469	5,53
Sumatera Barat	2016	0,331	1.261.915.864	1.180.338.806	130.145.379	5,27
Sumatera Barat	2017	0,318	2.014.646.639	1.699.580.667	139.094.074	5,30
Sumatera Barat	2018	0,321	2.014.646.639	1.784.401.030	116.230.717	5,14
Sumatera Barat	2019	0,31	2.076.398.191	1.844.831.704	79.695.675	5,01
Sumatera Barat	2020	0,305	2.106.647.207	2.162.598.913	108.088.089	-1,60
Riau	2015	0,364	654.220.250	79.202.000	559.669.579	0,22
Riau	2016	0,347	738.378.737	1.421.530.289	836.925.397	2,18
Riau	2017	0,325	1.457.997.067	1.607.851.462	723.990.116	2,66
Riau	2018	0,327	1.465.117.720	1.641.194.885	856.660.642	2,35
Riau	2019	0,33	1.548.578.928	1.913.695.540	808.563.768	2,81
Riau	2020	0,329	1.439.451.620	2.019.575.520	810.139.155	-1,12
Jambi	2015	0,361	995.754.598	51.823.285	251.045.177	4,21

Jambi	2016	0,349	1.070.452.478	81.644.852	69.691.960	4,37
Jambi	2017	0,335	1.397.912.161	934.827.673	188.917.963	4,60
Jambi	2018	0,334	1.399.367.134	939.049.860	170.443.032	4,69
Jambi	2019	0,32	1.433.203.410	1.067.008.374	152.855.128	4,37
Jambi	2020	0,32	1.444.166.395	1.201.394.675	149.039.606	-0,46
Sumatera Selatan	2015	0,36	985.542.760	69.405.320	497.915.042	4,42
Sumatera Selatan	2016	0,348	1.071.421.391	148.180.327	655.564.087	5,04
Sumatera Selatan	2017	0,361	1.697.897.817	855.483.709	637.875.921	5,51
Sumatera Selatan	2018	0,358	1.697.762.032	2.171.297.782	707.050.366	6,01
Sumatera Selatan	2019	0,33	1.743.742.960	2.259.489.237	763.869.162	5,69
Sumatera Selatan	2020	0,339	1.756.924.452	2.494.695.281	966.313.837	-0,11
Bengkulu	2015	0,376	1.046.080.820	63.893.200	52.282.428	5,13
Bengkulu	2016	0,357	1.070.751.292	468.362.410	52.783.845	5,28
Bengkulu	2017	0,351	1.301.538.847	635.034.086	43.701.416	4,98
Bengkulu	2018	0,362	1.300.978.160	110.698.384	40.963.180	4,97
Bengkulu	2019	0,34	1.334.178.390	148.677.988	22.616.578	4,94
Bengkulu	2020	0,334	1.350.729.863	207.808.002	36.970.633	-0,02
Lampung	2015	0,376	1.192.855.693	48.851.620	131.447.701	5,13
Lampung	2016	0,364	1.321.679.032	1.651.557.871	149.737.823	5,14
Lampung	2017	0,334	1.851.595.354	1.927.384.230	148.414.293	5,16
Lampung	2018	0,346	1.854.701.094	745.585.221	122.496.302	5,23
Lampung	2019	0,33	1.906.780.297	581.870.717	87.416.096	5,26
Lampung	2020	0,327	1.739.916.377	2.262.390.988	148.368.541	-1,67
Bangka Belitung	2015	0,283	897.887.443	55.444.770	54.983.955	4,08
Bangka Belitung	2016	0,275	905.526.208	77.898.689	50.251.504	4,10
Bangka Belitung	2017	0,282	980.297.314	438.826.470	39.043.007	4,47
Bangka Belitung	2018	0,281	1.018.435.175	460.227.705	53.519.592	4,45
Bangka Belitung	2019	0,27	1.046.862.622	491.156.874	43.368.025	3,32
Bangka Belitung	2020	0,262	1.052.377.716	0	39.426.053	-2,30
Kepulauan Riau	2015	0,364	695.943.711	42.537.210	242.313.505	6,02
Kepulauan Riau	2016	0,354	866.810.696	76.384.932	239.662.553	4,98
Kepulauan Riau	2017	0,334	1.059.822.693	569.776.571	197.995.489	1,98
Kepulauan Riau	2018	0,33	1.150.516.796	590.028.178	157.690.035	4,47
Kepulauan Riau	2019	0,34	1.190.057.596	645.650.637	103.447.118	4,84
Kepulauan Riau	2020	0,339	1.206.473.650	806.088.051	151.747.784	-3,80
Dki Jakarta	2015	0,431	0	0	12.659.962.912	5,91
Dki Jakarta	2016	0,411	0	2.883.078.374	12.030.019.209	5,87



Dki Jakarta	2017	0,413	0	2.121.801.940	16.605.608.520	6,20
Dki Jakarta	2018	0,394	0	2.645.603.991	15.026.197.590	6,11
Dki Jakarta	2019	0,39	0	2.796.003.497	11.585.304.509	5,82
Dki Jakarta	2020	0,399	0	3.230.470.784	18.272.465.990	-2,36
Jawa Barat	2015	0,415	1.303.654.355	23.630.030	873.581.024	5,05
Jawa Barat	2016	0,413	1.248.112.172	7.596.342.336	1.494.773.662	5,66
Jawa Barat	2017	0,403	3.011.001.477	9.118.920.858	1.504.427.465	5,33
Jawa Barat	2018	0,407	3.023.552.986	9.379.906.816	1.497.027.054	5,65
Jawa Barat	2019	0,4	3.212.647.404	10.018.939.411	1.150.063.940	5,07
Jawa Barat	2020	0,403	3.306.552.702	11.417.942.116	1.303.788.723	-2,44
Jawa Tengah	2015	0,382	1.803.931.189	57.972.640	650.875.594	5,47
Jawa Tengah	2016	0,366	1.859.907.223	5.263.717.151	779.355.174	5,25
Jawa Tengah	2017	0,365	3.652.586.431	6.566.890.149	834.422.861	5,26
Jawa Tengah	2018	0,378	3.652.586.431	6.511.740.480	760.737.570	5,30
Jawa Tengah	2019	0,36	3.784.512.513	6.974.422.226	564.290.384	5,40
Jawa Tengah	2020	0,362	3.830.691.947	7.607.305.225	764.710.178	-2,65
Di Yogyakarta	2015	0,433	920.544.722	39.084.040	80.502.169	4,95
Di Yogyakarta	2016	0,42	940.835.434	643.207.673	113.024.693	5,05
Di Yogyakarta	2017	0,432	1.314.372.147	967.000.859	98.447.377	5,26
Di Yogyakarta	2018	0,441	1.314.262.108	910.032.137	93.097.809	6,20
Di Yogyakarta	2019	0,42	1.351.102.020	978.540.310	56.035.674	6,59
Di Yogyakarta	2020	0,434	1.359.606.514	1.127.331.617	86.640.722	-2,69
Jawa Timur	2015	0,415	1.587.261.707	66.039.190	1.236.834.603	5,44
Jawa Timur	2016	0,402	1.672.878.372	5.516.240.625	1.485.750.232	5,57
Jawa Timur	2017	0,396	3.803.428.371	7.056.095.687	1.236.756.108	5,46
Jawa Timur	2018	0,379	3.813.411.928	6.858.141.681	1.386.411.992	5,47
Jawa Timur	2019	0,37	3.998.431.715	7.551.054.472	1.119.867.427	5,52
Jawa Timur	2020	0,366	4.072.075.656	8.429.808.252	1.358.344.777	-2,39
Banten	2015	0,401	640.981.003	20.986.310	455.310.674	5,45
Banten	2016	0,394	693.738.580	1.998.321.331	489.941.664	5,28
Banten	2017	0,382	1.059.320.237	2.230.361.117	636.231.269	5,75
Banten	2018	0,385	1.072.903.468	2.254.780.861	647.226.228	5,77
Banten	2019	0,37	1.140.003.353	2.489.732.034	533.856.815	5,29
Banten	2020	0,363	1.159.302.397	2.734.752.212	506.875.077	-3,38
Bali	2015	0,377	831.597.268	44.496.710	149.853.189	6,03
Bali	2016	0,366	850.144.224	844.872.363	171.994.343	6,33

Bali	2017	0,384	1.260.842.523	1.105.556.047	169.597.185	5,56
Bali	2018	0,377	1.268.585.388	1.042.840.035	182.554.550	6,31
Bali	2019	0,37	1.325.847.555	1.095.683.760	126.532.558	5,60
Bali	2020	0,369	1.344.031.319	1.292.329.368	150.459.921	-9,31
Nusa Tenggara Barat	2015	0,368	1.063.713.760	54.663.430	152.984.035	21,76
Nusa Tenggara Barat	2016	0,359	1.117.691.709	1.090.304.456	327.753.815	5,81
Nusa Tenggara Barat	2017	0,371	1.537.777.886	1.384.626.963	172.155.830	0,09
Nusa Tenggara Barat	2018	0,372	1.537.777.886	1.412.965.950	146.964.309	-4,50
Nusa Tenggara Barat	2019	0,38	1.583.746.053	1.573.794.788	124.847.166	3,90
Nusa Tenggara Barat	2020	0,376	1.484.527.774	1.604.013.784	183.750.779	-0,64
Nusa Tenggara Timur	2015	0,339	1.300.445.875	85.490.390	89.685.140	4,92
Nusa Tenggara Timur	2016	0,336	1.337.091.848	1.411.352.709	88.320.888	5,12
Nusa Tenggara Timur	2017	0,359	1.784.462.326	1.771.353.807	85.019.969	5,11
Nusa Tenggara Timur	2018	0,351	1.827.412.640	1.788.419.259	62.623.814	5,11
Nusa Tenggara Timur	2019	0,36	1.875.182.301	2.154.410.338	36.690.626	5,24
Nusa Tenggara Timur	2020	0,354	1.922.975.903	2.534.311.805	55.418.382	-0,83
Kalimantan Barat	2015	0,334	1.405.594.169	85.584.200	149.417.478	4,88
Kalimantan Barat	2016	0,341	1.493.486.253	199.767.934	141.806.926	5,20
Kalimantan Barat	2017	0,327	1.720.698.207	1.529.205.325	124.741.075	5,17
Kalimantan Barat	2018	0,339	1.724.402.496	1.508.354.942	147.536.279	5,07
Kalimantan Barat	2019	0,33	1.756.069.684	1.686.329.826	108.566.863	5,09
Kalimantan Barat	2020	0,317	1.766.686.880	1.712.829.144	119.818.669	-1,82
Kalimantan Tengah	2015	0,326	1.280.595.848	72.525.960	159.817.408	7,01
Kalimantan Tengah	2016	0,33	1.294.850.243	241.247.658	200.298.531	6,35
Kalimantan Tengah	2017	0,343	1.574.382.856	644.057.087	123.267.890	6,73
Kalimantan Tengah	2018	0,342	1.574.382.856	750.824.890	142.143.741	5,61
Kalimantan Tengah	2019	0,34	1.603.623.745	961.814.107	121.270.800	6,12
Kalimantan Tengah	2020	0,329	1.442.656.367	1.101.777.653	168.589.929	-1,40
Kalimantan Selatan	2015	0,353	701.725.536	63.890.470	159.000.000	3,82
Kalimantan Selatan	2016	0,332	779.517.454	271.304.779	209.216.036	4,40
Kalimantan Selatan	2017	0,347	1.106.532.187	970.490.213	154.707.007	5,28
Kalimantan Selatan	2018	0,344	1.118.213.289	935.797.533	169.920.751	5,08
Kalimantan Selatan	2019	0,33	1.188.146.871	1.111.000.137	131.615.429	4,08
Kalimantan Selatan	2020	0,332	1.215.803.040	1.207.119.768	162.968.563	-1,81
Kalimantan Timur	2015	0,316	57.312.515	8.651.350	668.000.000	-1,20
Kalimantan Timur	2016	0,315	80.402.179	1.016.403.395	690.750.462	-0,38
Kalimantan Timur	2017	0,33	71.490.657	1.107.407.923	609.621.646	3,13

Kalimantan Timur	2018	0,342	767.682.423	1.070.867.111	599.348.149	2,64
Kalimantan Timur	2019	0,33	815.693.641	1.153.401.862	402.647.694	4,74
Kalimantan Timur	2020	0,328	943.411.298	1.259.014.544	423.223.050	-2,85
Kalimantan Utara	2015	0,294	651.247.428	59.947.820	131.569.861	3,40
Kalimantan Utara	2016	0,3	1.032.459.159	377.594.814	53.913.245	3,55
Kalimantan Utara	2017	0,308	1.185.105.787	291.494.490	46.684.714	6,80
Kalimantan Utara	2018	0,303	1.185.105.787	338.681.844	77.752.122	5,36
Kalimantan Utara	2019	0,3	1.209.517.808	342.324.842	87.466.226	6,90
Kalimantan Utara	2020	0,292	1.205.960.153	199.829.426	88.591.420	-1,11
Sulawesi Utara	2015	0,368	1.026.948.809	66.891.890	78.728.000	6,12
Sulawesi Utara	2016	0,386	1.065.545.204	712.639.625	91.228.190	6,16
Sulawesi Utara	2017	0,396	1.390.272.639	1.008.208.366	78.413.110	6,31
Sulawesi Utara	2018	0,394	1.427.544.997	956.923.255	78.154.252	6,00
Sulawesi Utara	2019	0,37	1.463.436.158	1.044.216.782	54.248.230	5,65
Sulawesi Utara	2020	0,37	1.488.989.572	1.178.928.790	76.916.300	-0,99
Sulawesi Tengah	2015	0,374	1.221.602.865	73.986.290	78.262.293	15,50
Sulawesi Tengah	2016	0,362	1.272.925.036	835.621.352	64.668.487	9,94
Sulawesi Tengah	2017	0,355	1.546.247.611	976.155.892	58.864.256	7,10
Sulawesi Tengah	2018	0,346	1.586.163.908	948.918.647	65.512.132	6,28
Sulawesi Tengah	2019	0,33	1.637.588.970	1.207.098.898	51.489.956	8,83
Sulawesi Tengah	2020	0,326	1.662.156.644	1.399.644.243	67.533.953	4,86
Sulawesi Selatan	2015	0,424	1.180.010.167	78.357.990	247.991.298	7,19
Sulawesi Selatan	2016	0,426	1.394.148.361	1.991.324.790	231.803.625	7,42
Sulawesi Selatan	2017	0,407	2.509.480.255	2.565.500.203	241.132.527	7,21
Sulawesi Selatan	2018	0,397	2.509.480.255	2.540.292.651	194.238.451	7,04
Sulawesi Selatan	2019	0,39	2.586.312.342	2.632.211.447	169.796.916	6,91
Sulawesi Selatan	2020	0,389	2.357.591.182	2.798.428.832	293.663.027	-0,70
Sulawesi Tenggara	2015	0,399	1.176.423.577	73.493.950	27.476.090	6,88
Sulawesi Tenggara	2016	0,402	1.200.634.199	738.810.238	60.565.883	6,51
Sulawesi Tenggara	2017	0,394	1.563.334.271	1.040.897.146	48.714.073	6,76
Sulawesi Tenggara	2018	0,409	1.575.959.517	1.164.611.106	49.254.878	6,40
Sulawesi Tenggara	2019	0,4	1.614.486.358	1.209.370.996	33.084.578	6,50
Sulawesi Tenggara	2020	0,389	1.639.676.883	1.338.603.326	44.372.103	-0,65
Gorontalo	2015	0,42	845.395.651	60.343.000	28.031.074	6,22
Gorontalo	2016	0,419	884.557.753	319.995.163	26.648.505	6,52
Gorontalo	2017	0,43	997.598.871	393.157.693	22.148.141	6,73
Gorontalo	2018	0,403	1.006.924.707	369.637.026	19.881.801	6,49

Gorontalo	2019	0,41	1.043.126.752	436.242.139	13.537.847	6,40
Gorontalo	2020	0,408	946.452.624	448.148.751	20.465.267	-0,02
Sulawesi Barat	2015	0,363	895.580.933	60.445.350	11.532.482	7,31
Sulawesi Barat	2016	0,364	925.147.622	455.010.837	27.854.106	6,01
Sulawesi Barat	2017	0,354	1.008.360.523	498.440.658	25.333.547	6,39
Sulawesi Barat	2018	0,37	1.025.033.063	453.507.325	18.378.411	6,26
Sulawesi Barat	2019	0,37	1.064.068.728	610.909.814	12.719.431	5,67
Sulawesi Barat	2020	0,364	970.566.678	686.319.793	16.763.597	-2,42
Maluku	2015	0,34	1.177.774.674	86.622.000	121.873.039	5,48
Maluku	2016	0,348	1.260.897.986	730.397.413	53.981.312	5,73
Maluku	2017	0,343	1.555.603.048	733.329.638	60.545.835	5,82
Maluku	2018	0,343	1.670.234.402	850.028.631	40.626.369	5,91
Maluku	2019	0,32	1.699.714.805	843.459.434	28.272.210	5,41
Maluku	2020	0,318	1.721.885.692	1.047.755.445	37.625.504	-0,92
Maluku Utara	2015	0,28	1.061.177.950	114.608.060	58.194.166	6,10
Maluku Utara	2016	0,286	1.132.578.857	233.861.505	59.417.889	5,77
Maluku Utara	2017	0,317	1.265.846.334	553.215.205	29.494.901	7,67
Maluku Utara	2018	0,328	1.331.236.347	654.320.605	32.079.978	7,86
Maluku Utara	2019	0,31	1.349.662.180	780.339.362	19.808.114	6,10
Maluku Utara	2020	0,308	1.377.253.571	779.996.819	34.348.873	4,92
Papua Barat	2015	0,44	1.284.079.945	75.877.780	271.712.574	4,15
Papua Barat	2016	0,373	1.322.765.639	489.419.916	178.956.654	4,52
Papua Barat	2017	0,39	1.411.972.998	338.947.588	109.372.639	4,02
Papua Barat	2018	0,394	1.431.332.966	444.560.372	140.766.513	6,25
Papua Barat	2019	0,39	1.456.520.204	491.563.794	110.643.402	2,66
Papua Barat	2020	0,382	1.461.166.659	704.169.245	135.720.599	-0,77
Papua	2015	0,421	2.277.932.698	460.303.520	288.079.783	7,35
Papua	2016	0,39	2.502.449.137	328.169.423	277.042.212	9,14
Papua	2017	0,397	2.338.200.799	1.029.337.888	257.823.723	4,64
Papua	2018	0,384	2.571.298.119	918.901.192	253.674.351	7,32
Papua	2019	0,39	2.616.545.381	1.198.617.032	210.211.963	-15,75
Papua	2020	0,392	2.625.302.515	1.435.655.811	229.487.436	2,32